PENANGANAN MSALAH PEMUKIMAN KUMUH SECARA KOILABORATIF DENGAN KETERLIBATAN BERBAGAI PEMANGKU KEENTINGAN

Oleh

Sulfitriani

105611119216

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut: Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman; Kandice bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki metadata tinggi; Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- Keteraturan bangunan
- Jalan Lingkungan;
- Drainase Lingkungan,
- Penyediaan Air Bersih/Minum;
- Panggilan Persampahan;

- Pengelolaan Air Limbah;
- Pengamanan Kebakaran; dan
- Ruang Terbuka Publik.

DAFTAR PUSTAKA

Nahrudin, Z. (2018). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Lingkungan. INA-Rxiv, Open

Science Framework.

surat edaran - Kotaku - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PDFkotaku.pu.go.id › file

bentuk-bentuk kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya ...

PDF<https://ejournal2.undip.ac.id> › download